

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank adalah lembaga keuangan yang memainkan peran yang sangat penting dalam stabilitas dan pengembangan pertumbuhan ekonomi. Untuk menjalankan peran ini, bank harus terlebih dahulu memastikan bahwa mereka melakukan bisnis mereka dengan baik yang berdampak pada kemampuan mereka memaksimalkan keuntungan yang stabil dan meningkat. Tidak mudah bagi bank untuk selalu mempertahankan keuntungan maksimal karena besarnya sejumlah risiko bisnis yang akan dihadapi bank termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko suku bunga. Keragaman risiko yang dihadapi bank mengharuskan manajemen untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang efektif karena semakin tinggi pencapaian kinerja yang diharapkan, semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapinya. Hal ini karena bank menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis.

Dalam menertibkan tata aturan tentang manajemen risiko perbankan, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2016 yang mengatur tentang manajemen risiko bank umum. Mengatur tentang risiko potensi kerugian yang dapat berupa risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik.

Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan yang berurusan dengan pemilik dana dan juga pihak defisit dana menghadapi risiko kredit atau risiko gagal bayar. Semakin rendah rasio gagal bayar nasabah, berarti semakin baik kesempatan bank untuk mengembalikan uang pemilik dana dan semakin tinggi pula kesempatan bank untuk memperoleh laba. Penelitian Saiful & Ayu (2019) dan Yousuf & Felfodi (2018) dengan menggunakan proksi *Non Performing Loan* (NPL) mengemukakan bahwa semakin kecil kredit bermasalah, semakin besar profitabilitas perbankan. Artinya, kredit macet berbanding terbalik dengan profitabilitas.

Dalam menjalankan bisnisnya, setiap bank diharuskan untuk menjaga tingkat likuiditasnya. Bentuk – bentuk likuiditas dapat berupa dana deposit yang disimpan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini berfungsi sebagai dana persediaan ketika hal – hal yang tidak diinginkan terjadi. Dana cadangan memiliki 2 (dua) fungsi yakni; sebagai dana cadangan ketika krisis terjadi dan sebagai dana cadangan ketika nasabah secara tiba – tiba ingin menarik dananya. Oleh karenanya bank dianjurkan untuk memiliki dana cadangan terhadap kredit yang disalurkan. Dalam penelitian Manta, Badircea, & Pirvu (2018) dan Wulandari, Anggraeni & Andati (2016) dengan menggunakan proksi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menyebutkan bahwa LDR berbanding terbalik terhadap profitabilitas. Artinya, ketika terlalu banyak kredit yang disalurkan dibandingkan deposit mengakibatkan berkurangnya profitabilitas dari perbankan.

Selain dalam sisi keuangan perbankan, bank juga harus memperhatikan aspek operasional internal bank. Dalam penelitian Topak & Talu (2017) dan Supriyono & Herdhayinta (2019) dengan menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) ditemukan bahwa rasio BOPO berbanding terbalik terhadap profitabilitas perbankan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar beban operasional perbankan, maka menyebabkan profitabilitas terhambat.

Secara umum berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi kepemilikan pemerintah dan swasta. Kepemilikan pemerintah artinya bank tersebut merupakan prioritas dari pemerintah dalam mendapatkan pendapatan negara maupun pendapatan daerah. Disamping itu, badan usaha milik pemerintah memiliki kemudahan untuk merekrut pegawai terbaik dengan potensi gaji yang relatif besar, berbagai macam tunjangan sebagai PNS dan uang pensiun.

Berdasarkan dari kepemilikannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi bank umum nasional menjadi 6 (enam) jenis yakni; Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa), Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa (BUSN Non Devisa), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran serta Bank Asing.

**Tabel 1.1 Jumlah Aset Perbankan Berdasarkan Jenis Bank (Miliar Rupiah)**

| <b>Bank</b>     | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bank Persero    | 2.076.605        | 2.313.316        | 2.666.516        | 2.986.617        | 3.342.996        | 3.574.130        |
| BUSN Devisa     | 2.200.142        | 2.363.516        | 2.672.238        | 2.964.855        | 3.126.359        | 3.393.130        |
| BUSN Non Devisa | 186.817          | 193.149          | 73.684           | 88.231           | 101.036          | 120.319          |
| BPD             | 440.691          | 475.696          | 529.746          | 604.820          | 655.963          | 717.518          |
| Bank Campuran   | 278.312          | 313.570          | 319.328          | 331.734          | 390.331          | 306.364          |
| Bank Asing      | 432.582          | 473.336          | 468.286          | 411.376          | 451.661          | 451.514          |
| <b>Total</b>    | <b>5.615.150</b> | <b>6.132.583</b> | <b>6.729.799</b> | <b>7.387.634</b> | <b>8.068.346</b> | <b>8.562.974</b> |

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (OJK, 2020)

Tabel diatas merupakan jumlah aset masing – masing jenis bank dari tahun 2014 hingga 2019. Data menunjukkan bahwa tiap – tiap jenis perbankan menunjukkan tren meningkat yang diwakili oleh Bank Persero, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan Bank Asing. Sedangkan Bank Umum Swasta Non Devisa menunjukkan tren negatif, dari jumlah aset sebesar Rp 186.817 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 120.319 miliar pada tahun 2019.

Perbedaan antara bank milik pemerintah dan milik swasta akan lebih jelas terlihat apabila data dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok data bank milik pemerintah terdiri dari bank persero dan bank pembangunan daerah, sedangkan kelompok bank milik swasta terdiri dari Bank Swasta Devisa, Bank Swasta Non Devisa, Bank Asing serta Bank Campuran.

**Tabel 1.2 Jumlah Aset Bank Milik Pemerintah dan Swasta (Miliar Rupiah)**

| <b>Bank Milik</b> | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>     | <b>2019</b>   |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Pemerintah</b> | 2.517.296        | 2.789.012        | 3.196.263        | 3.591.438        | 3.998.959       | 4.291.647     |
| <b>Swasta</b>     | 3.097.854        | 3.343.571        | 3.533.537        | 3.796.196        | 4.069.388       | 4.271.327     |
| <b>Selisih</b>    | <b>(580.558)</b> | <b>(554.559)</b> | <b>(337.274)</b> | <b>(204.759)</b> | <b>(70.429)</b> | <b>20.321</b> |

Sumber: Data diolah (2020)

Tabel diatas adalah selisih antara jumlah aset yang dimiliki bank milik pemerintah dan milik swasta selama 5 (lima) tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa bank milik pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan aset bank persero dan bank pembangunan daerah yang tumbuh masing – masing sebesar 72,11% dan 62,82%. Bila dihitung secara total, pertumbuhan aset bank milik pemerintah dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 70.49%. Sementara itu, meskipun bank milik swasta juga mengalami peningkatan dalam jumlah aset namun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar tingkat pertumbuhan aset bank milik pemerintah. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan total aset bank swasta hanya sebesar 37,88% jauh dibawah angka pertumbuhan jumlah aset bank milik pemerintah. Selain itu juga, tahun 2019 merupakan kali pertama dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yang menunjukkan jumlah aset bank milik pemerintah lebih banyak dibandingkan jumlah aset bank milik swasta. Hal ini menunjukkan bahwa performa bank milik

pemerintah jika ditinjau dari total asetnya, lebih baik dibandingkan dengan bank milik swasta.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh manajemen risiko kredit terhadap profitabilitas ditemukan hasil yang berbeda – beda. Penelitian Saiful & Ayu (2019) misalnya ditemukan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh secara negatif terhadap profitabilitas. Pengaruh negatif ini disebabkan karena tingkat NPL yang rendah menandakan bank mampu menarik keuntungan berupa bunga pada tiap pinjaman yang diberikan. Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara NPL dan profitabilitas (Manta, et. al., 2018). Begitu juga dengan penelitian mengenai risiko likuiditas yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten terhadap rasio profitabilitas. Semakin besar LDR maka semakin besar pula potensi profit yang akan diraih oleh bank sehingga menunjukkan pengaruh yang searah (Supriyono & Herdhayinta, 2019). Sebaliknya, demi menjaga likuiditas yang bagus maka bank perlu untuk menyisihkan dana depositnya untuk mencapai profitabilitas yang baik (Wulandari, et. al., 2016). Oleh karenanya, pengaruh antara LDR dan profitabilitas menjadi negatif. Pada penelitian mengenai risiko operasional dengan menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) ditemukan hasil pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas sebab rasio BOPO yang rendah menunjukkan efisiensi bank dalam mengelola operasional bank (Topak & Talu, 2017). Namun,

pada penelitian lain ditemukan hasil sebaliknya seperti yang dilakukan oleh Saiful & Ayu (2019).

Dikarenakan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang inkonsisten, maka peneliti tertarik untuk meneliti Analisis Manajemen Risiko Bank dan Profitabilitas (Studi Pada Bank Milik Pemerintah dan Swasta). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan ekstansi dari penelitian Saiful & Ayu (2019) dengan tetap menggunakan rasio NPL sebagai proksi variabel risiko kredit, rasio LDR sebagai proksi variabel risiko likuiditas, rasio BOPO sebagai proksi variabel manajemen risiko operasional dan rasio ROA sebagai proksi profitabilitas bank. Penelitian ini juga menambahkan analisis perbedaan antara manajemen risiko yang dilakukan oleh bank milik pemerintah dan swasta dengan bersumber pada proksi dan model penelitian Mamahit et. al. (2016) guna menginvestigasi adanya perbedaan praktik manajemen risiko pada bank milik pemerintah dan swasta.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana pengaruh risiko kredit perbankan terhadap profitabilitas perbankan milik swasta dan pemerintah?
2. Bagaimana pengaruh risiko likuiditas perbankan terhadap profitabilitas perbankan milik swasta dan pemerintah?
3. Bagaimana pengaruh risiko operasional perbankan terhadap profitabilitas perbankan milik swasta dan pemerintah?
4. Apakah terdapat perbedaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan profitabilitas antara bank swasta dan pemerintah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh antara risiko kredit perbankan terhadap profitabilitas perbankan.
2. Untuk menguji pengaruh antara risiko likuiditas perbankan terhadap profitabilitas perbankan.
3. Untuk menguji pengaruh antara risiko operasional perbankan terhadap profitabilitas perbankan.
4. Untuk menguji perbedaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan profitabilitas antara bank swasta dan pemerintah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih ilmu baru dalam penelitian mengenai manajemen risiko perbankan, terutama dalam pengaruh manajemen risiko kredit, likuiditas dan operasional terhadap profitabilitas perbankan.

2. Secara Praktis

Sebagai acuan kebijakan bagaimana sebaiknya dalam pengimplementasian manajemen risiko kredit, manajemen risiko likuiditas dan juga operasional demi memperoleh keuntungan. Dan juga untuk membandingkan kinerja perbankan swasta dan bank milik pemerintah yang dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat maupun Badan Usaha Milik Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **E. Batasan Penelitian**

1. Dalam menilai kinerja manajemen risiko perbankan yang ada di Indonesia, pada penelitian ini aspek manajemen risiko dibatasi dengan menggunakan rasio NPL sebagai proksi pengukuran risiko kredit, rasio LDR sebagai proksi pengukuran risiko likuiditas, rasio BOPO sebagai proksi pengukuran risiko operasional dan ROA sebagai proksi pengukuran profitabilitas.

2. Guna mendapatkan hasil yang baik dan representatif terhadap kondisi perbankan yang terjadi di Indonesia, peneliti hanya membatasi industri perbankan hanya pada bank umum yang ada di Indonesia.
3. Dalam mendapatkan sumber data peneliti membatasi sumber data hanya yang berasal dari Bursa Efek Indonesia.